



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	B-15
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

DPRD Bentuk Pansus Tindaklanjuti LHP BPK

PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap kepatuhan belanja daerah tahun 2021.

Penetapan pansus dan keanggotaannya tersebut dilaksanakan saat rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (11/2).

Pada pansus tersebut total ada sebanyak 14 anggota dewan yang masuk menjadi anggota dan juga pimpinan pansus. Mereka berasal dari lintas fraksi partai politik yang berada di DPRD Sumbar.

Sebanyak 14 orang anggota dewan tersebut yakni dari Fraksi Gerindra, Hidayat, Mario Syah Johan dan Khairudin Simanjuntak.

Dari Fraksi PKS, Budiman dan Rahmat Saleh. Fraksi Demokrat, Ali Tanjung dan Nofrizon.

Fraksi PAN, Maigus Nasir dan Daswanto. Fraksi Golkar, Afrizal dan Hardinalis Kobal.

Kemudian dari Fraksi gabungan PPP-Nasdem. Terakhir dari Fraksi PDIP-PKB, Donizar.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan pansus tersebut dibentuk setelah BPK menyerahkan LHP Tahun 2021. Adanya LHP, menurut Supardi, bertujuan untuk memastikan pelaksanaan keuangan di pemerintah daerah dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"LHP BPK bertujuan untuk menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah," ujarnya.

Supardi mengatakan fungsi dari LHP juga untuk memastikan apakah pengelolaan keuangan daerah yang dialokasikan pada APBD 2021 telah dilaksanakan dengan optimal.

Sesuai dengan ketentuan

pasal 5 ayat 2 huruf a peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2010, disebutkan bahwa terhadap pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, paling lama dua minggu sejak diterima, dibahas oleh DPRD.

"Pembahasan tersebut dilakukan dengan pembentukan pansus," paparnya.

Pansus yang telah dibentuk ini, menurut Permendagri pula, akan melakukan pembahasan paling lambat satu minggu.

Merujuk pada aturan tersebutlah, DPRD pada 3 Februari lalu telah menyurati semua fraksi yang ada. Melalui surat bernomor 162/130/FPP-2022 seluruh fraksi diminta untuk mengusulkan nama-nama anggota yang akan ditempatkan pada pansus.

"Seiring dengan telah dibentuknya tim pansus. Maka pembahasan sudah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya," tegas Supardi.

Supardi menambahkan, tugas dari pansus yang telah ditetapkan adalah mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan terhadap pembahasan LHP BPK-RI tersebut.

"Berdasarkan data-data tersebut tim pansus akan melakukan pembahasan secara mendalam dan mendetail. Salah satunya untuk menindaklanjuti poin-poin yang menjadi temuan, catatan ataupun rekomendasi BPK pada LHP terkait," ujarnya.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, tambah dia, tim pansus juga bertugas untuk menyusun dan merumuskan rekomendasi. Rekomendasi ini nantinya akan ditindaklanjuti pula untuk dijadikan sebagai rekomendasi resmi DPRD.

"Rekomendasi tersebut nantinya akan kami (DPRD) berikan pada pemprov," ujarnya.

Terkait rekomendasi ini, lanjut dia, akan disusun dan diserahkan dengan tujuan perbaikan atau penyempurnaan jalannya roda pemerintahan di Sumbar. (*)